

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN

**Jl. KH Syekh Nawawi Al Bantani, Desa Sukajaya, Sukajaya, Kec. Serang, Kota Serang,
Banten 42188**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, 15 (Lima Belas) Program dengan 22 Indikator Program 55 Kegiatan serta 171 Sub Kegiatan (menjadi 169 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 70.874.987.485,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.893.430.100,- atau sebesar 98.62%.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang ditetapkan adalah:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan/sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)
- 2) Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut dengan indikator tujuan/sasaran:
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA)
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
- 3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).

Dari hasil pengukuran, secara ringkas diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1 Program, 23 Kegiatan, 83 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat pada Unit Induk, serta Sub Bagian Tata Usaha pada setiap Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.973.197.328,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.538.740.756,- atau sebesar 99.16%.
- 2) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan melaksanakan 10 Program, 14 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan (berubah menjadi 34 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.412.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.111.688.527,- atau sebesar 97.92%.
- 3) Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 sebesar 69.84, capaian sebesar 94,10% dari target yang ditetapkan.
- 4) Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 sebesar 54.32, capaian IKA sebesar 99.74% dari target yang ditetapkan.

- 5) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada tahun 2024 sebesar 85.46, capaian IKAL sebesar 103,03% dari target yang ditetapkan.
- 6) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan, 52 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp.4.489.700.157,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.243.000.817,- atau sebesar 94.51%.
- 7) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) pada tahun 2024 sebesar 43.03, capaian IKTL sebesar 110.16% dari target yang ditetapkan.
- 8) Nilai dan Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Banten pada Tahun 2024 berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 62,54% (Sedang).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Banten semata, tetapi telah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), dimana sebagaimana kita ketahui saat ini isu lingkungan telah menjadi isu global.

Peran serta masyarakat dan dunia usaha sangat penting dan strategis terutama dalam era industrialisasi sekarang ini, diharapkan peran serta masyarakat dan dunia usaha lebih optimal, sehingga percepatan pembangunan pengelolaan lingkungan hidup bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien dengan mewujudkan kemitraan secara nyata.

Kesungguhan Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan telah membuahkan hasil, minimal wawasan dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha secara umum makin meluas. Namun demikian upaya-upaya yang lebih keras masih perlu dilakukan.

Dimasa yang akan datang, cakupan persoalan lingkungan cenderung makin luas, dalam dan rumit akibat semakin cepatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang dilaksanakan yang tentunya mempunyai dampak yang perlu dicegah dan dieliminir sehingga tidak melampaui ambang batas yang ada.

Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang kami hasilkan dan laporkan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan DLHK Provinsi Banten merupakan hal yang optimal, oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungannya sehingga Pembangunan Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan Banten Ramah Lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

Serang, 7 Februari 2025

**KEPALA DLHK PROVINSI
BANTEN**



Dr. Wawan Gunawan, S.Sos., M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5 Isu-isu Strategis	18
1.6 Proses Bisnis.....	19
1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2024.....	19
1.8 Sistematika Laporan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	23
2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 – 2026	23
2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024.....	25
2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	47
3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	48
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	49
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	50
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	51
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan	51
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	53
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	54
3.2 Realisasi Anggaran	89
BAB IV PENUTUP	115
4.1 Kesimpulan	115

4.2 Saran-Saran Rekomendasi.....	116
LAMPIRAN	117
1. Perjanjian Kinerja Eselon II	
2. Surat Pernyataan Reviu	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun LKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten selama tahun 2023.

Terkait tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta kelestarian hutan menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya
- b. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD
- c. Memberikan feedback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di komunikasi, informasi, persandian dan statistik

- e. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya
- f. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya
- g. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 adalah :

- 1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Perda Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Daerah
- 7. Pergub Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten;
- 8. Pergub Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 9. Pergub Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten,

```

graph TD
    Kepala[Kepala] --> Sekretaris[Sekretaris]
    Kepala --> KJF1[Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya]
    Kepala --> KJF2[Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana]
    Kepala --> KJF3[Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana]
    Kepala --> KJF4[Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana]
    Kepala --> KJF5[Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, Terampil dan Pelaksana]
    Kepala --> UPTD_CDK[UPTD / CDK]

    Sekretaris --> Subag[Subag Umum dan Kepegawaian]
    Sekretaris --> KJF_TK[Kelompok Jabatan Fungsional Terampil dan Pelaksana]

    Subag --> KJF_TK

    UPTD_CDK --> C1[Cabang Dinas Kehutanan Pandeglang, Serang, Cilegon]
    UPTD_CDK --> C2[Cabang Dinas Kehutanan Lebak, Tangerang]
    UPTD_CDK --> U1[UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan]
    UPTD_CDK --> U2[UPTD Balai Pengelolaan Tahura Banten]
    UPTD_CDK --> U3[UPTD Lab Lingkungan]
  
```

Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai **tugas** membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan **fungsi dan kewenangan** :

- Page 3

- d. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
- g. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- i. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- j. Pengelolaan Persampahan;
- k. Pengelolaan Hutan;
- l. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- m. Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai perturan perundang-undangan.

UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan teknis laboratorium, Penelitian dan pengujian kualitas lingkungan dan penyelenggaraan uji profesiensi.

UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, UPTD Sertifikasi dan

Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.

UPTD Pengelolaan TAHURA Banten

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten adalah UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya yang meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan Taman Hutan Raya Banten.

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon dan Wilayah Lebak Tangerang

Cabang Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai wilayah kerja. Cabang Dinas melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan teknis operasional sebagai bahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan Perangkat Daerah.

Cabang Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan tugas penunjang dalam penyelenggaraan administrasi guna percepatan dan efisiensi pelayanan publik urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelaksana kegiatan bidang kehutanan yang berada di luar kawasan hutan.

Uraian tugas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan;
 - a. Perencanaan Lingkungan Hidup,
 - b. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
 - c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI),
 - d. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
 - g. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - h. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - i. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - j. Pengelolaan Persampahan;

- k. Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - l. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
 - m. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan

- kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
 - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
 - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
 - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan dinas;
 - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
 - 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan barang dan aset,

kerumahtanggaan, kepastakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan;
- 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
- 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
- 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
- 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
- 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
- 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
- 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

- a. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi;
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi;
 - c. Proses rekomendasi penerbitan persetujuan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pemerintah kabupaten/kota yang menerbitkan persetujuan lingkungan bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL UPL dalam wilayah Provinsi;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. Penanganan Pengaduan, Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Meliputi Sanksi Administrasi, Sengketa/Perdata dan Pidana,

- g. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal;
 - h. Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - i. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
 - j. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi;
 - k. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan Cabang Dinas/UPTD
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
- 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional;
 - b. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu Provinsi;
 - c. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota;
 - d. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - e. Penyimpanan limbah B3 dalam kewenangan perizinan berusahnya dari Provinsi;
 - f. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - h. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - i. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan Cabang Dinas/UPTD
- 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

- a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam

merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengusahaan Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi;
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
 - c. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - d. Penggunaan Kawasan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
 - e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
 - g. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun; dan
 - h. Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan Cabang Dinas/UPTD;
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;

- 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis dinas;
 - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
 - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
 - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi;
 - a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - b. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi;
 - c. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi;
 - d. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

- e. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan; dan
 - f. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan Cabang Dinas/UPTD
 - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
 - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- e. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan teknis laboratorium.

UPTD Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan

UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- b. Penyusunan rencana teknis operasional sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;

- c. Pelayanan sertifikasi benih, bibit dan sumber benih tanaman hutan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan produksi benih dan bibit tanaman hutan dan tanaman produktif untuk kegiatan konservasi tanah, air dan lingkungan di luar kawasan hutan;
- e. Pelayanan pengawasan peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- f. Bimbingan teknis dan pelayanan perbenihan kepada pelaku usaha perbenihan, dunia pendidikan, aparaturnya dan masyarakat;
- g. Penyediaan data dan informasi sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan;
- h. Fasilitasi penelusuran, identifikasi, pembangunan, pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan sumber benih tanaman hutan dan plasma nutfah;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, tenaga teknis lapangan dan tenaga laboratorium terkait perbenihan dan sertifikasi;
- j. Fasilitasi pengembangan tanaman langka/endemik/varietas/species yang hampir punah/memiliki nilai ekonomis tinggi secara in vitro;
- k. Fasilitasi supervisi pembangunan dan penilaian kelayakan kebun sumber benih serta monitoring evaluasi kebun sumber benih;
- l. Fasilitasi rekomendasi Penetapan Pengada dan atau Pengedar Benih dan Bibit Tanaman Hutan; dan
- m. Pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga UPTD.

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan perencanaan pengelolaan kawasan;

- c. pelaksanaan perlindungan;
- d. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- e. pelaksanaan pemanfaatan kawasan hutan, tumbuhan dan satwa;
- f. pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan pelaporan.

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon Dan Wilayah Lebak Tangerang

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Cabang Dinas Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Cabang Dinas;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Cabang Dinas;
- c. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam kaitannya perkerjaan dan efisiensi lingkungan publik;
- d. pelaksanaan pendampingan pengembangan hutan rakyat, pengelolaan hutan kota, dan penghijauan lingkungan di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil hutan, pemasaran dan industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tertib administrasi pemanfaatan tumbuhan dan Satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga KSA dan KPA yang berada di luar kawasan hutan negara di wilayah kerja;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di luar kawasan hutan Negara di wilayah kerjanya; dan
- i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan; dan

- j. melaksanakan tugas teknis operasional dan penunjang dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

1.5 Isu-isu Strategis

Secara umum permasalahan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten saat ini adalah sebagai berikut:

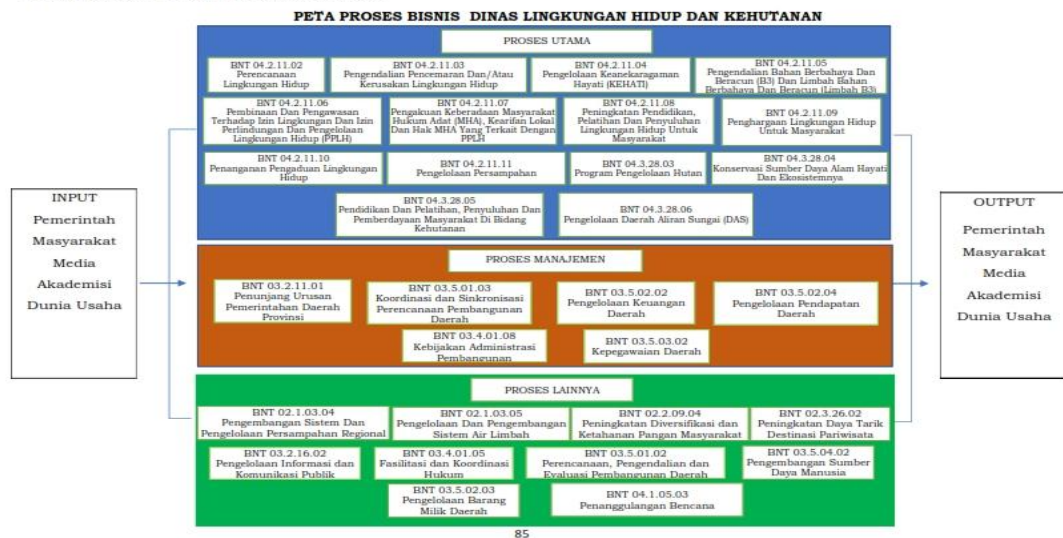
- 1) Masih rendahnya kualitas air, udara, dan air laut, hal ini dikarenakan:
 - a. Belum optimalnya perencanaan lingkungan Hidup;
 - b. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman Hayati;
 - d. Belum maksimalnya pengelolaan hutan adat;
 - e. Masih kurangnya lembaga yang terlibat pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. Masih kurangnya peran serta lembaga/ kab.kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup;
 - h. Belum maksimalnya pelayanan pengaduan terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - i. Belum optimalnya pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3;
 - j. Belum optimalnya Penanganan Sampah.
- 2) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya, hal ini dikarenakan:
 - a. Belum optimalnya Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan serta Rehabilitasi lahan kritis;
 - b. Belum optimalnya Tata Kelola DAS;
 - c. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan, pengelolaan dan konservasi hutan;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan TAHURA, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Fungsi Kawasan Bernilai Ekosistem Penting di Wilayah Prov Banten.

1.6 Proses Bisnis

Adaptasi dalam business process pemerintahan juga penting untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dan teknologi yang canggih, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau bagi masyarakat.

Peta bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

B. PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH



Gambar.2

1.7 Tindak Lanjut Rekomendasi LHE AKIP Internal Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor : 700/0190- Inspektorat 2024 Tanggal 27 Maret 2024, Inspektorat Provinsi Banten merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten beserta seluruh jajarannya agar :

1. Menyusun diagram crosscutting yang memberikan informasi hubungan kinerja/aktivitas/aspek menunjukkan kesinambungan antar unit kerja dan antar bidang;
2. Pengumpulan data dan pengukuran data kinerja menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan dipergunakan sebagai pengumpulan data, dimanfaatkan ke dalam bentuk pelaporan tahunan

3. Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, melaksanakan mutasi pegawai dengan dasar kinerja pegawai tersebut (sangat baik, baik, butuh perbaikan atau kurang);
4. Pengukuran kinerja mampu mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi, bahwa refofusing organisasi dilakukan berdasarkan arahan kebijakan Kementerian Menpan RB (alih jabatan struktural ke fungsional) belum berdasarkan hasil pengukuran kinerja/ beban kerja pada OPD;
5. Dalam perencanaan kinerja menjelaskan target yang belum tercapai yaitu pada capaian target Indeks Kualitas Udara
6. Informasi dalam laporan kinerja sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas pada rencana aksi melalui dokumen perubahan rencana aksi serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
7. Pelaksanaan evaluasi melibatkan seluruh bidang, baik triwulan maupun evaluasi mandiri AKIP disertai dengan laporan, melampirkan Nota Dinas dan undangan rapat Evaluasi Triwulan I.II.III.IV
8. Evaluasi kinerja dimanfaatkan dalam penyesuaian aktivitas dalam rangka akuntabilitas kinerja
9. Melakukan Kordinasi dan Konsultasi dengan tim implementasi SAKIP Provinsi Banten tentang penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Terhadap rekomendasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten telah menindak lanjuti seluruh rekomendasi Inspektorat Provinsi Banten dan dokumen hasil tindak lanjut tetang dalam google drive <https://drive.google.com/drive/folders/1WXBhbWh0ZP3kuf6L1G30m75jCVnOKU9-?usp=sharing>.

1.8 Sistematika Laporan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penyusun LKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Dalam proses penyusunan LKjIP juga melibatkan seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLHK Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Surat Pernyataan telah di reviu
- 3) BA LHE
- 4) Lain - lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis 2023 – 2026

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten Tahun 2023-2026 sama dengan Visi Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 yakni : **“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Misi OPD tidak boleh terlepas dari visinya. tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten tahun 2023-2026, adalah **Misi ke-3 (tiga) dan Misi ke-4 (empat)** yaitu:

1. Misi ke-3 : Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari.
2. Misi ke-4 : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun Tujuan RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang mengacu pada misi ke-3 adalah : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari, serta Tujuan RPD yang mengacu kepada misi ke-4 yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan Renstra yang mengacu pada Misi ke-3 dan tujuan RPD, yaitu : Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem.

Mengacu kepada Tujuan RPD Provinsi Banten 2023-2026 tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Tujuan Renstra yang mengacu kepada Misi ke-4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih.

Tujuan dalam Renstra ini merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi terakait, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Agar tujuan tersebut dapat terwujud dengan baik dan tepat waktu, maka dirumuskan sasaran nya antara lain : 1) Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut. 2) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan 3) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Tujuan, Sasaran serta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir Renstra
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)	67	69.77	73.16	76.56	80	80,00
2	Menjaga kualitas LH, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan utk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem	1. Meningkatkan kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	73.80	72.09	72.19	72.29	72.39	74.30
			Indeks Kualitas Air (IKA)	52.36	50.86	50.96	51.06	51.56	54.50
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	65.00	65.50	66.00	70.00	80.40
		2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	31.50	32.00	32.50	33.00	33.50	35.40

2.2 Perubahan Rencana Kerja 2024

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah Provinsi Banten di tahun ke-dua terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Banten, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Banten, dokumen ini juga merupakan instrumen dalam mewujudkan target pada RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengusung tema **“Pemantapan Daya Saing Daerah untuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi sebagai Kerangka Tahap Modernisasi”**. Penyusunan tema tersebut tentunya mempertimbangkan perkembangan kondisi global, nasional, dan regional, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026, serta isu strategis lain yang perlu menjadi perhatian. Hal ini sejalan dengan kebijakan mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan: (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2024-2026; (2) RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030; (3) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024 Triwulan II; (4) Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; (5) Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2024. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2024 telah disusun pada Tahun Anggaran 2023 melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan telah menjadi pedoman di dalam menyusun dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023. Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, dirasa perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hal tersebut sejalan dengan mandate Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah tahun 2023;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
3. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024 yang akan akan disepakati bersama antara Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Lebih lanjut dokumen KUAP-PPASP Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut dalam matrik APBD Perubahan 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu (Rp)	
			APBD Murni	APBD Perubahan	APBD Murni	APBD Perubahan
A	URUSAN PEMERINTAHAN NON URUSAN				51,493,357,726	51,973,197,328
I	URUSAN PEMERINTAHAN NON URUSAN				51,493,357,726	51,973,197,328
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				51,493,357,726	51,973,197,328

		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100%	100%	51,493,357,726	51,973,197,328
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	310,000,000	401,008,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	80,000,000	80,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,000,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,000,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100,000,000	100,000,000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6 laporan	100,000,000	193,008,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	37,072,632,798	35,539,122,000
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139 Orang /Bulan	139 Orang /Bulan	36,194,597,798	34,828,767,000
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	789,035,000	601,355,000
10	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	31,000,000	51,000,000
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	6,500,000	6,500,000
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	2 dokumen	32,000,000	32,000,000
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/	1 Laporan	1 Laporan	6,500,000	6,500,000

		Semesteran SKPD				
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	6,500,000
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		20,000,000	20,000,000
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100,000,000	92,500,000
17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	40,000,000	40,000,000
18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	4,000,000	4,000,000
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	8 Orang	56,000,000	48,500,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100%	100%	385,343,468	521,806,468
20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	32,865,000	42,865,000
21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8 paket	100,000,000	144,880,000
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80,000,000	137,483,000
23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20,000,000	20,000,000
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000	12,000,000
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	117,478,468	149,578,468
26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	0%	0%	0	0
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0	0
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8,752,752,000	8,433,477,000
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	12 Laporan	1,622,000,000	1,741,549,883

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7,130,752,000	6,691,927,117
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	540,000,000	648,682,000
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	27 Unit	300,000,000	300,000,000
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	20 Unit	150,000,000	240,702,000
31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit	72 unit	30,000,000	47,980,000
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000
33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan	100%	100%	184,000,000	234,000,000
34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	7,500,000	7,500,000
35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	35,000,000	35,000,000
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	7 paket	100,000,000	150,000,000
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	6,500,000	6,500,000
38	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	35,000,000
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100%	100%	235,000,000	290,000,000
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	10 Unit	185,000,000	185,000,000

40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit	43 Unit	50,000,000	105,000,000
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	100%	66,800,000	62,667,400
41	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,300,000	3,300,000
42	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16,500,000	16,500,000
43	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,300,000	3,300,000
44	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2,200,000	2,200,000
45	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11,000,000	11,000,000
46	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Paket	5,500,000	1,367,400
47	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	25,000,000
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%	100%	313,400,000	301,917,000
48	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	61,740,000	61,740,000
49	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	251,660,000	240,177,000
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)	Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100%		125,820,000	125,820,000
50	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		92,700,000	92,700,000

51	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 Unit		33,120,000	33,120,000
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100%		110,000,000	110,000,000
52	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket		30,000,000	30,000,000
53	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket		25,000,000	25,000,000
54	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket		15,000,000	15,000,000
55	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen		10,000,000	10,000,000
56	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		30,000,000	30,000,000
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK PSC	100%		170,000,000	163,500,000
57	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		40,000,000	33,500,000
58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		130,000,000	130,000,000
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC	100%		91,000,000	106,117,000
59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit		66,000,000	81,117,000
60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 unit		25,000,000	25,000,000
16	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%		212,000,000	295,243,700
61	Peyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	2 paket	5,000,000	90,620,000
62	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket		37,292,000	33,829,000
63	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket		97,816,000	87,479,700
64	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket		19,124,000	19,124,000

65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12 Dokumen		3,000,000	2,064,000
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		49,768,000	62,127,000
17	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%		723,992,460	1,108,052,460
67	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	29 unit		123,566,000	123,566,000.00
68	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	43 unit	600,426,460	984,486,460
18	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	100%		75,000,000	63,776,300
69	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		75,000,000	63,776,300
19	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100%		1,411,686,000	2,942,006,000
70	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pejak dan perizinannya	12 Unit		215,000,000	95,836,000
71	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	38 Unit	1,196,686,000	2,846,170,000
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100%		107,400,000	107,400,000
72	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		6,000,000	6,000,000
73	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		19,000,000	19,000,000
74	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket		43,000,000	43,000,000
75	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket		6,000,000	6,000,000
76	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		5,400,000	5,400,000
77	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		28,000,000	28,000,000

21	Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100%		30,000,000	30,000,000
78	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit		30,000,000	30,000,000
22	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada (UPTD SPTH	100%		162,000,000	143,520,000
79	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		77,000,000	58,520,000
80	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		85,000,000	85,000,000
23	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH	100%		294,531,000	232,582,000
81	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		125,282,500	63,333,500
82	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27 Unit		30,000,000	30,000,000
83	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4 Unit		139,248,500	139,248,500
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11,132,885,000	14,412,090,000
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				11,132,885,000	14,412,090,000
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				577,907,600	796,437,600
		Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkulaitas	100 persen		577,907,600	796,437,600
24	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	4 Dokumen	6 Dokumen	304,679,000	396,009,000
84	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2 dokumen	4 dokumen	218,349,000	309,679,000
85	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	2 dokumen	2 dokumen	86,330,000	86,330,000
25	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2 Dokumen		273,228,600	400,428,600
86	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang	1 dokumen		24,185,000	24,185,000

		dilakukan pembinaan				
87	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 dokumen		249,043,600	376,243,600
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				2,569,950,000	2,526,030,000
		<i>Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	61,5 persen		2,339,950,000	2,281,010,000
		<i>Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan</i>	21,8 persen		230,000,000	245,020,000
26	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4 Dokumen		2,339,950,000	2,281,010,000
88	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen		26,600,000	20,100,000
89	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		10,000,000	10,000,000
90	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		10,000,000	10,000,000
91	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	12 Laporan		1,964,950,000	1,942,950,000
92	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		10,000,000	10,000,000
93	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1 Laporan		20,720,000	15,640,000
94	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	14 Lokasi		241,880,000	241,880,000
95	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan		20,800,000	20,440,000
96	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		10,000,000	10,000,000
97	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		25,000,000	-

27	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	130,000,000	150,000,000
98	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	50 Paket	52 Paket	50,000,000	75,000,000
99	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5 Unit	5 Unit	25,000,000	25,000,000
100	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	0 Unit	5,000,000	-
101	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000
28	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	95,020,000
102	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	95,020,000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Titik Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0 Titik	0 Titik	-	-
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	0 titik	0 titik	-	-
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0 dokumen	0 dokumen	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	0 dokumen	0 dokumen	-	-
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				50,000,000	6,000,000
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	14,29 persen	14,29 persen	50,000,000	6,000,000
29	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100 Persen	100 Persen	50,000,000	6,000,000
103	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang	20 Orang	50,000,000	6,000,000

V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50,000,000	50,000,000
		<i>Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3</i>	100 persen	100 persen	50,000,000	50,000,000
30	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000
104	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	5 Dokumen	25,000,000	25,000,000
105	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000
VI	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				65,000,000	133,400,000
		<i>Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</i>	11,76 persen	11,76 persen	65,000,000	133,400,000
31	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	15,000,000	8,400,000
106	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	8,400,000

32	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Lembaga	2 Lembaga	50,000,000	125,000,000
107	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	125,000,000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				990,000,000	855,615,000
		<i>Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	100 persen	100 persen	990,000,000	855,615,000
33	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	990,000,000	855,615,000
108	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	19,960,000
109	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	150 Orang	150 Orang	50,000,000	50,000,000
110	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	288 Keluarga	288 Keluarga	554,000,000	451,330,000
111	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	348 Lembaga	348 Lembaga	366,000,000	334,325,000
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				150,000,000	150,000,000
		<i>Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	68 lembaga/ 7 Kab.kota	68 lembaga/ 7 Kab.kota	150,000,000	150,000,000

34	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	93 lembaga/ 7 Kab.kota	93 lembaga/7 Kab.kota	150,000,000	150,000,000
112	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	100 Entitas	100 Entitas	150,000,000	150,000,000
IX	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				142,092,400	127,092,400
		<i>Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup</i>	85 persen	85 persen	142,092,400	127,092,400
35	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100 persen	100 persen	142,092,400	127,092,400
113	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	16 Dokumen	16 Dokumen	1,458,400	1,458,400
114	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	175 Badan Usaha	160 Badan Usaha	140,634,000	125,634,000
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				225,000,000	186,510,000
		<i>Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti</i>	100%	100%	225,000,000	186,510,000
36	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	<i>Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</i>	100%	100%	225,000,000	186,510,000
115	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	20 perkara	20 perkara	50,000,000	39,000,000

116	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10 perkara	10 perkara	50,000,000	43,450,000
117	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 pengaduan	20 pengaduan	125,000,000	104,060,000
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				6,312,935,000	9,581,005,000
		<i>Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi</i>	100 persen	100 persen	6,312,935,000	9,581,005,000
37	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100 persen	100 persen	6,312,935,000	9,581,005,000
118	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	189 Ton	200 Ton	6,288,050,000	9,556,120,000
119	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	24,885,000	24,885,000
C	URUSAN PILIHAN				4,442,500,000	4,489,700,157
III	URUSAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN				4,442,500,000	4,489,700,157
XII	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				2,477,500,000	2,309,816,100
		<i>Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan</i>	25%	25%	670,000,000	692,234,000
		<i>Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang</i>	2500 ha	2500 ha	551,250,000	605,850,000
		<i>Luas lahan kritis yang ter rehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon</i>	2500 ha	2500 ha	501,250,000	462,992,800
		<i>Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat</i>	90%	90%	605,000,000	548,739,300
38	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	184,024,000
120	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	5 Dokumen	6 Dokumen	150,000,000	184,024,000
39	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4 Dokumen	4 Dokumen	120,000,000	107,250,000

121	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	17,250,000
122	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000
123	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000
124	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000
40	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	8 Unit Manajemen	7 Unit Manajemen	250,000,000	270,000,000
125	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	25,000,000	75,000,000
126	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	7 Unit Manajemen	6 Unit Manajemen	225,000,000	195,000,000
41	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Ketercapaian Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	10 Unit Manajemen	10 Unit Manajemen	150,000,000	130,960,000
127	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	15 Unit Manajemen	15 Unit Manajemen	75,000,000	55,960,000
128	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit manajemen	5 Unit manajemen	75,000,000	75,000,000

42	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK LT	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000
129	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000
43	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000
130	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000
44	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	100 persen	100 persen	526,250,000	580,850,000
131	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	38,560,000
132	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	375 hektar	377 hektar	300,000,000	450,000,000
133	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	10 unit	0 unit, 1 laporan	100,000,000	6,040,000
134	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	30,000,000
135	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10 Hektar	3 Hektar	56,250,000	56,250,000
45	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	100 persen	100 persen	476,250,000	437,992,800
136	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	20,473,800
137	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	63 hektar	63 Ha	300,000,000	281,269,000

138	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	50,000,000	50,000,000
139	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Laporan	2 Laporan	30,000,000	30,000,000
140	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	4 Hektar	3 Ha	56,250,000	56,250,000
46	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)	Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH	200.000 btg	200.000 btg	480,000,000	439,755,300
141	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180 Ha	180 Ha	480,000,000	439,755,300
47	Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	100 persen	100 persen	125,000,000	108,984,000
142	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengekar Benih, Pengadaan dan Pengekar Bibit, Serta Pengadaan dan Pengekar Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	25,000,000	25,000,000
143	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	25,000,000	25,000,000
144	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	25,000,000	25,000,000
145	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	4 Sertifikat	4 Sertifikat	25,000,000	25,000,000
146	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	8,984,000
XIII	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				1,395,000,000	1,424,923,057
		Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100 persen	100 persen	945,000,000	945,359,057
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	9 Kelompok	9 Kelompok	100,000,000	84,976,000
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	9 Kelompok	9 Kelompok	100,000,000	88,670,000
		Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	28.57%	28.57%	250,000,000	305,918,000
48	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100 persen	100 persen	945,000,000	945,359,057
147	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	48 Operasi	48 Operasi	450,000,000	404,597,057

148	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	100 Ha	50 Ha	50,000,000	50,000,000
149	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12,5 Ha	12,5 Ha	50,000,000	50,000,000
150	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	3 permohonan	3 permohonan	20,000,000	19,880,000
151	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	20,000,000
152	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4 Desa	4 Desa	125,000,000	125,000,000
153	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	162,948,000
154	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	130,000,000	112,934,000
49	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000
155	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000
50	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	100 persen	100 persen	80,000,000	64,976,000
156	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1 Ha	1 Ha	15,000,000	15,000,000
157	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	1 Ha	15,000,000	5,800,000
158	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	40 Orang	50,000,000	44,176,000

51	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000
159	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/ atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	20,000,000
52	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	100 persen	100 persen	80,000,000	68,670,000
160	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	5 Ha	5 Ha	15,000,000	5,370,000
161	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1 Ha	1 Ha	15,000,000	13,300,000
162	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40 Orang	40 Orang	50,000,000	50,000,000
53	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100 persen		250,000,000	305,918,000
163	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	26,680,000
164	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	40,000,000
165	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	5 Ha	8 Ha	170,000,000	239,238,000
XIV	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				310,000,000	372,336,000
		Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	47 kelompok	47 kelompok	310,000,000	372,336,000

54	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 persen	100 persen	310,000,000	372,336,000
166	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	160 Orang	153 orang	50,000,000	30,530,000
167	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	40 Kelompok	43 Kelompok	180,000,000	279,536,000
168	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	400 Ha	80,000,000	62,270,000
XV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)				260,000,000	382,625,000
		<i>Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun</i>	20%		260,000,000	382,625,000
55	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%		260,000,000	382,625,000
169	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen		30,000,000	33,566,000
170	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	130 Orang		200,000,000	319,059,000
171	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga		30,000,000	30,000,000
JUMLAH PAGU					66,918,742,726	70,874,987,485

2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja 2024

Terdapat perubahan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan Penjabat Gubernur Banten dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,00	70,00
	Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,22	74,22
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54,46	54,46
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	80,20	82,95
2	Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	35,20	39,06

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026 serta Perjanjian Kinerja antara Penjabat Gubernur Banten dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan/sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)
- 2) Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut dengan indikator tujuan/sasaran:
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA)
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
- 3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).

Penilaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) setiap tahunnya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Berikut hasil penilaian indeks tersebut untuk tahun 2024:

No	Jenis Indeks	Nilai	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	54.32	
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	69.84	
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	85.46	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL)	43.03	

Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan komponen-komponen untuk menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Banten tahun 2024 adalah sebesar 62,54 (kategori sedang)



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Provinsi Banten
2024



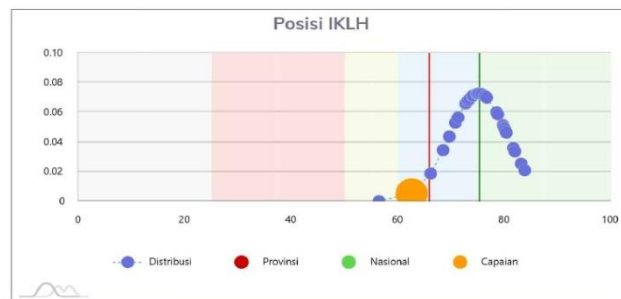
Kepala Daerah : Al Muktabar
Luas Wilayah : 935277 Km²
Populasi : 12431390 jiwa

Kepala DPRD : Andra Soni
Kategori Daerah : -
Pendapatan Per Kapita : 6614739

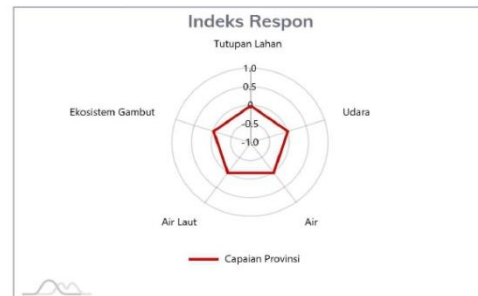
IKLH
62.54
SEDANG

Indeks Respon

Peringkat
Nasional : 37 dari 38 Provinsi



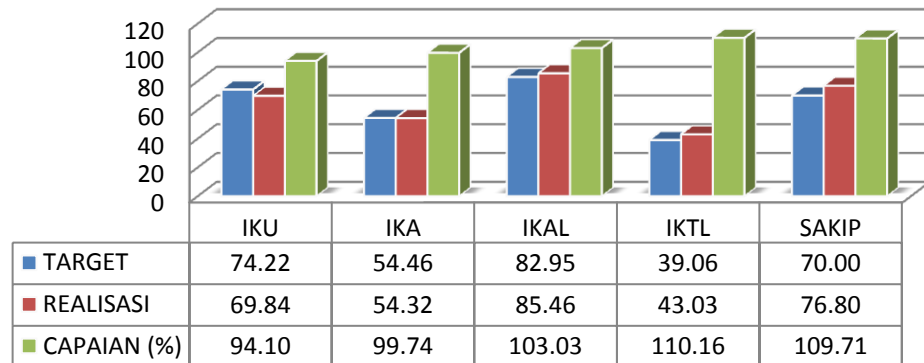
Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
UDARA	175	310	300
AIR	283	693	666
LAUT	33	44	44
LAHAN	0	8	8
TOTAL	491	1055	1018



3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Penjabat Gubernur Banten dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, serta Berita Acara Kesepakatan Hasil Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten diketahui bahwa Capaian Kinerja antara target dan realisasi pada Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagaimana grafik berikut:

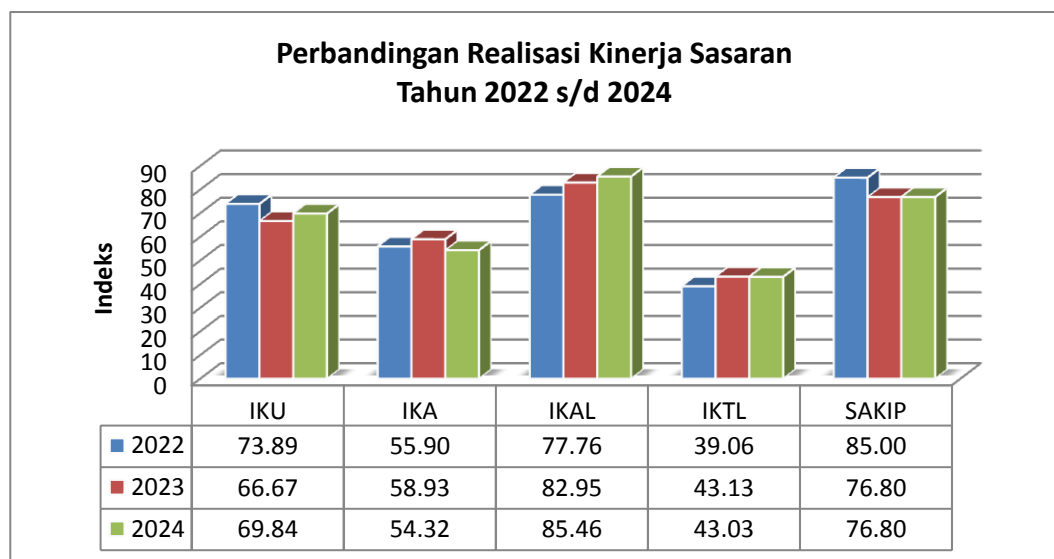
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pada Indikator Sasaran DLHK Tahun 2024



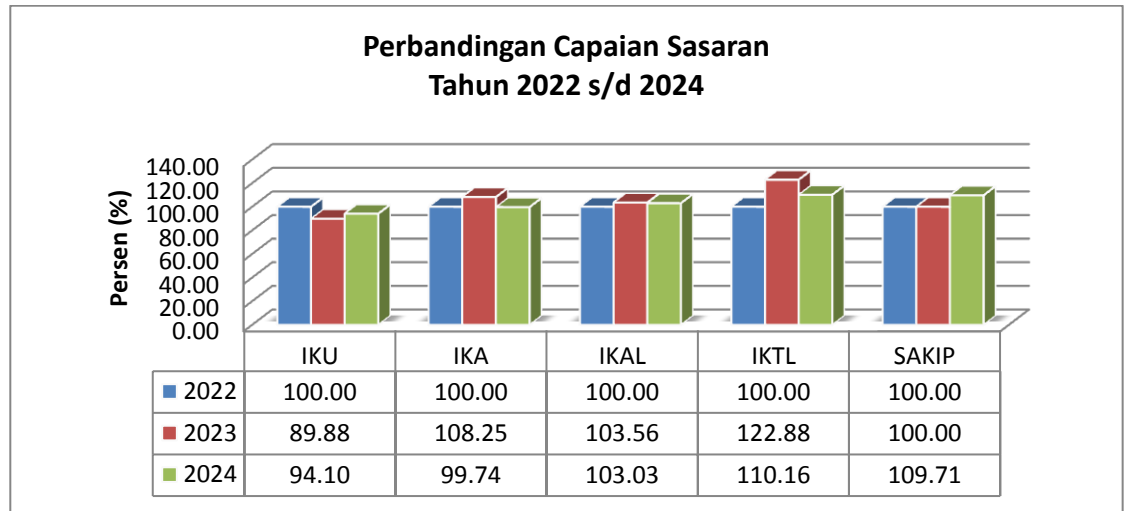
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) capaian kinerjanya dibawah 100%, sementara untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Lahan (IKTL) dan Capaian SAKIP Perangkat Daerah capaian kinerjanya diatas 100%.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagaimana grafik berikut:



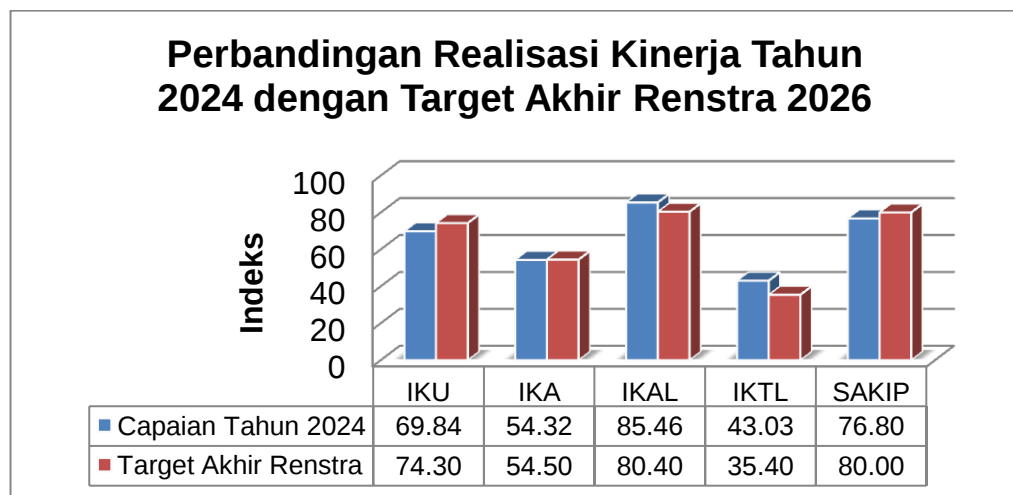
Adapaun perbandingan antara capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun 2022 pada sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa realisasi kinerja untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) setiap tahunnya mengalami tren peningkatan, untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) kinerja dan capaian kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023, sementara untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) kinerja dan capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023.

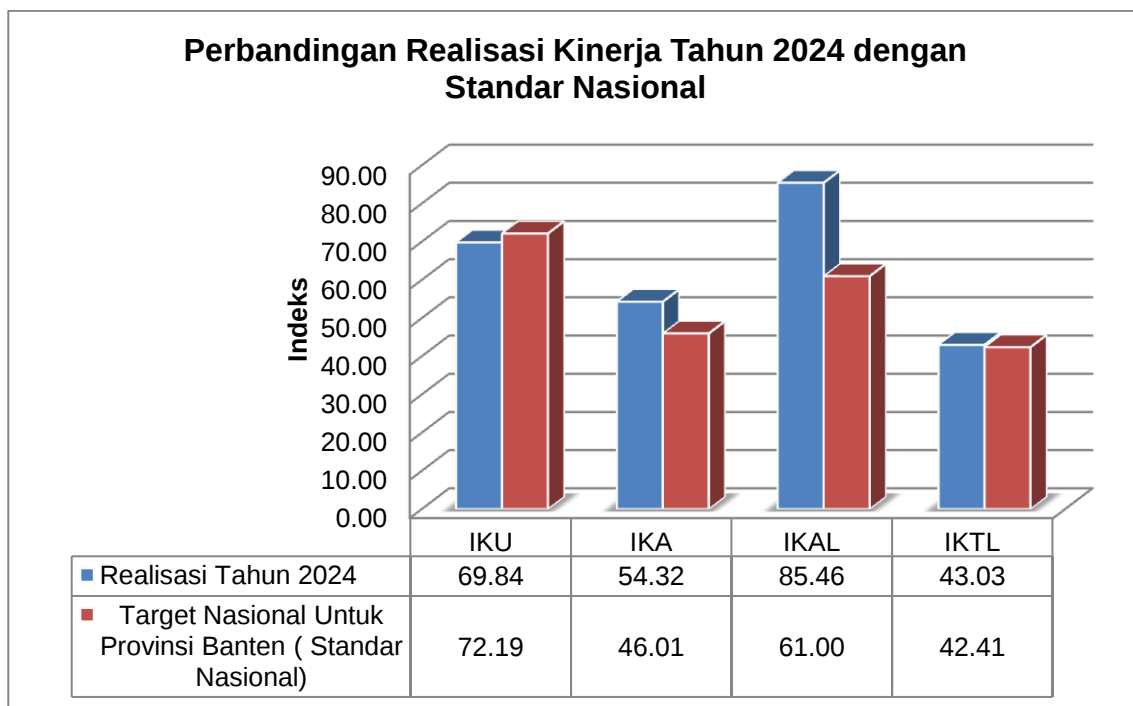
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target akhir Renstra pada Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebagaimana grafik berikut:



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) capaian kinerjanya sudah melebihi dari target akhir Renstra yang ditetapkan, sementara untuk capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), serta SAKIP masih dibawah target target akhir Renstra yang ditetapkan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2024 untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) berada di bawah target nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Banten, sedangkan untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) realisasi kinerja pada tahun 2024 di atas target nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Banten.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) setiap tahunnya mengalami tren peningkatan, hal ini disebabkan karena masih tingginya kesadaran masyarakat serta fokusnya perhatian pemerintah dalam menjaga dan mengelola air laut salah satunya dengan tidak membuang sampah atau limbah ke air laut sehingga kondisi air laut tidak tercemar.

Indeks Kualitas Udara (IKU) kinerja dan capaian kinerjanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan sudah adanya peningkatan kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha dalam mengelola udara buang yang dihasilkan industri serta penggunaan energi baru dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan, selain itu meningkatnya peralihan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan yang digunakan masyarakat (misalnya penggunaan mobil listrik, kereta listrik dll).

Indeks Kualitas Air (IKA) capaian kinerjanya mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu:

- a. Adanya limbah domestik (masih rendahnya cakupan fasilitas (IPAL) komunal di kawasan perkotaan dan pedesaan
- b. Adanya limbah industri karena masih kurangnya pengawasan dan penegakan hukum
- c. Masih adanya erosi dan sedimentasi akibat aktivitas penambangan dan deforestasi di daerah hulu sungai
- d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan
- e. Masih banyaknya sampah plastik yang terbuang ke sungai

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) kinerja dan capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas pelaporan kabupaten/kota dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung kinerja kualitas tutupan lahan yang dilaporkan kedalam system pelaporan yang disediakan oleh kementerian.

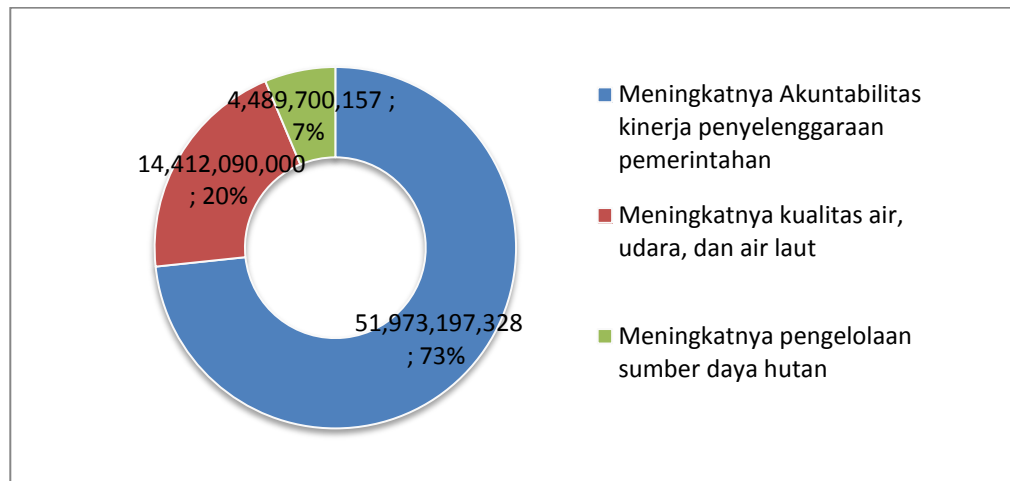
Beberapa alternative/solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran pada tahun selanjutnya yaitu dengan melakukan:

- a) Peningkatan Pengelolaan Emisi dari Kendaraan
- b) Pengendalian Emisi Industri
- c) Penanganan Sampah
- d) Penghijauan dan Pengurangan Polusi
- e) Mengkampanyekan gerakan tanam pohon di masyarakat
- f) Penggunaan Teknologi dan Pemantauan Kualitas Udara
- g) Edukasi dan Kesadaran Publik
- h) Kerjasama Lintas Sektor
- i) Peningkatan Pengelolaan Limbah Domestik
- j) Penegakan Hukum
- k) Pengelolaan Sedimentasi
- l) Peningkatan Praktik Pertanian Ramah Lingkungan

- m) Pengendalian Limbah Laut: Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri ke perairan laut
- n) Pembersihan Laut dan Pantai
- o) Pelaksanaan program bersih pantai secara berkala melibatkan masyarakat dan komunitas lokal.
- p) Meningkatkan luas areal penanaman pada lahan kritis
- q) Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat
- r) Memberikan pelatihan pemetaan dan cara pelaporan sesuai dengan ketentuan

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Komposisi anggaran dalam APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tahun 2024 untuk masing masing sasaran kinerja adalah sebagai berikut:



Meskipun komposisi anggaran untuk sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) lebih kecil dibandingkan dengan sasaran yang lain, namun capaian kinerja yang diperoleh lebih besar dari capaian kinerja sasaran yang lain. Tingginya angka capaian pada indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan efisiensi penggunaan sumberdaya terjadi karena berjalannya fungsi koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya pencapaian indicator sasaran tersebut, misalnya meningkatkan koordinasi dengan Balai Pengeloaan DAS Citarum Ciliwung, Perum Perhutani KPH Banten, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pihak pihak lainnya dalam upaya penanganan lahan kritis.

Efisiensi Anggaran yang dilakukan sebesar $(100\% - \text{Realisasi anggaran} / \text{target anggaran} \times 100) = (100\% - 98.62\%) = 1,38$

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Tahun 2024 Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 guna mendukung tercapainya Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebanyak 15 Program, 55 Kegiatan dan 171 Sub Kegiatan (menjadi 169 Sub Kegiatan pada APBD Perubahan), adapun rinciannya sebagai berikut :

A. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan/sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)

Program/Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan melaksanakan 1 Program, 23 Kegiatan, 83 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat pada Unit Induk, serta Sub Bagian Tata Usaha pada setiap Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
SEKRETARIAT				100	100	100
1 A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	9	100
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100

		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	100
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	6	100
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	100
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	139	139	100
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100
		10	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	1	100
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100

	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	2	100
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	1	100
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100
	16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100	100	100
	17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	2	100
	18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	100
	19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah	100	100	100

	20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	3	100
	21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	8	100
	22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	18	100
	23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100
	24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	12	100
	25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
	26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100
	27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
	28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100
	29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27	27	100

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	100
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72	72	100
		32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100
		33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100
CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG							
1B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
	8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100	100	100
		34	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100

		35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100
		36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100
		37	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	1	100
		38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100
		39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100
		40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
	9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100	100	100
		41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
		42	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	2	100
	10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		Persentase ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK Lebak Tangerang	100	100	100
		43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	8	100

			Dinas Operasional atau Lapangan				
		44	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24	24	100
CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON							
1 C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)		Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada CDLHK Pandeglang Serang Cilegon	100	100	100
		45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100
		46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	100
		47	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	100
		48	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	100
		49	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)		Persentase ketercapaian kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada CDLHK PSC	100	100	100

		50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
		51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)		Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada CDLHK PSC	100	100	100
		52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100
		53	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27	27	100
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN							
1 D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
	14	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Lab Lingkungan	100	100	100
		54	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	1	100
		55	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	100
		56	Penyediaan Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			100

			Logistik Kantor		7	7	
		57	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	100
		58	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100	100	100
		59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	10	100
		60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	43	43	100
UPTD SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN							
1 E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
	16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)		Persentase ketercapaian Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100	100	100
		61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100

	62	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100
	63	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2	2	100
	64	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	5	100
	65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	100
	66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
17		Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD SPTH	100	100	100
	67	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	2	100
18		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)	Persentase Ketercapaian kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD SPTH	100	100	100
	68	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
	69	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
19		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)	Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD SPTH	100	100	100

		70	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	100
		71	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	27	27	100
		72	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	4	100
UPTD PENGELOLAAN TAHURA BANTEN							
1 F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	100	100
	20	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100	100	100
		73	Peyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2	2	100
		74	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	3	100
		75	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	100
		76	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	1	100
		77	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12	12	100

		78	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
	21	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase ketercapaian kegiatan pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100	100	100
		79	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	29	29	100
		80	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43	43	100
	22	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase Ketercapaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerinthan daerah pada (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)	100	100	100
		81	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
	23	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		Persentase ketercapaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100	100	100
		82	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	10	100
		83	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	38	38	100

B. Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut dengan indikator tujuan/sasaran:

- a. Indeks Kualitas Air (IKA)
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
- c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan melaksanakan 10 Program, 14 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan (berubah menjadi 34 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan).

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS							
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkulaitas	100	100	100
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	4	4	100
		1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	2	2	100
		2	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	2	2	100
	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Ketercapaian Jumlah Dokumen Kajian Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	2	2	100

		3	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1	1	100
		4	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1	1	100
2	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12	17.65	150.09
	3	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Ketercapaian Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	1	100
		5	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1	1	100
	4	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Ketercapaian Jumlah Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2	2	100

		6	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3	3	100
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100
	5	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	100	100	100
		7	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	100
		8	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	150	150	100
		9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	288	288	100
		10	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	348	348	100

4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	68 /7	135/7	198.53
	6	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	93 /7	135/7	145.16
		11	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	100
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	85.00	86.87	102.2
	7	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100	100	100
		12	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	16	16	100
		13	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	160	160	100

6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	100	100	100
	8	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	100	100	100
		14	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	20	20	100
		15	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	10	10	100
		16	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20	20	100
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN							
7 A	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	62	64	104.07
	9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4	4	100

		17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	1	100
		18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	1	100
		19	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1	1	100
		20	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	12	12	100
		21	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1	1	100
		22	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	1	1	100
		23	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	14	14	100

	24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1	1	100
	25	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1	1	100
	26	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (tidak dilaksanakan dalam APBD Perubahan)	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	0	#DIV/0!
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	14.29	14.29	100
	10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	100	100	100
	27	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20	20	100
9	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Presentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	100	100	100
	11	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ketercapaian Jumlah dokumen laporan Pengelolaan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6	6	100

		28	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/ Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	5	100
		29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/ atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1	1	100
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	100	101.55	101.55
	12	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100	101.55	101.55
		30	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	258 Ton	262 Ton	101.55
		31	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1	1	100
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN							

7 B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	21.80	21.80	100
	13	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Ketercapaian Jumlah dokumen peningkatan akreditasi pada UPTD Lab Lingkungan	5	5	100
		32	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	52	52	100
		33	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	5	5	100
		34	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi (tidak dilaksanakan dalam APBD Perubahan)	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
		35	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	1	100
	14	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan Kepada Masyarakat pada UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Banten	12	12	100
		36	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	12	12	100

- C. Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).

Sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan, 52 Sub Kegiatan.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Sub Kegiatan/Target Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN							
1A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	25	44.57	178
	1	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHK)		Ketercapaian Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	5	6	120
		1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	6	6	100
	2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4	4	100

	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	100
	3	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1	1	100
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1	1	100
	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1	1	100
3	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Ketercapaian Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani dan Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	17	17	100

		6	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	1	100
		7	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	6	6	100
	4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun		Ketercapaian Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dan Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	20	24	120
		8	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	Jumlah Unit Management yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	15	15	100

		9	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5	9	180
BIDANG PENGELOLAN DAS, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							
2 A	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	28.57	28.57	100
	5	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	100	100	100
		10	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	1	1	100
		11	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1	1	100
		12	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	8 Ha	8 Ha	100

3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	47	58	123
	6	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100	100	100
		13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	153	153	100
		14	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	55	55	100
		15	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	404 Ha	101.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	20	40	200
	7	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100	100	100

		16	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1	1	100
		17	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	280	280	100
		18	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1	1	100
CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG							
1 B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan tangerang	2500	2830	113.20
	8	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³ /Tahun (CDLHK LT)		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi Di wilayah CDLHK LT	1	1	100
		19	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	1	100

	9	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	100	84.00	84.00
		20	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2	2	100
		21	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	375	320	85
		22	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	10	10	100
		23	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100
		24	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	10	0	0
2B	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	9	9	100

	10	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)		Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Lebak dan Tangerang	1	1	100
		25	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	1	100
	11	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	100	100	100
		26	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	1	1	100
		27	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1	1	100
		28	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40	40	100

CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON						
1 C	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	2500	2363.32 94.53
	12	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)		Ketercapaian Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi di wilayah CDLHK PSC	1	1 100
		29	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/ Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	1 100
	13	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	100	100 100

		30	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	100
		31	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	63	63	100
		32	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5	5	100
		33	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/ atau Pengawasan dalam rangka pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	100
		34	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	3	3	100
2C	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	9	9	100
	14	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convention On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)		Ketercapaian Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES wilayah Pandeglang Serang dan Cilegon	1	1	100

		35	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	1	100
	15	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	100	100	100
		36	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	5	5	100
		37	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	1	1	100
		38	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	40	40	100
UPTD SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN							
1 D	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	90	99.12	110

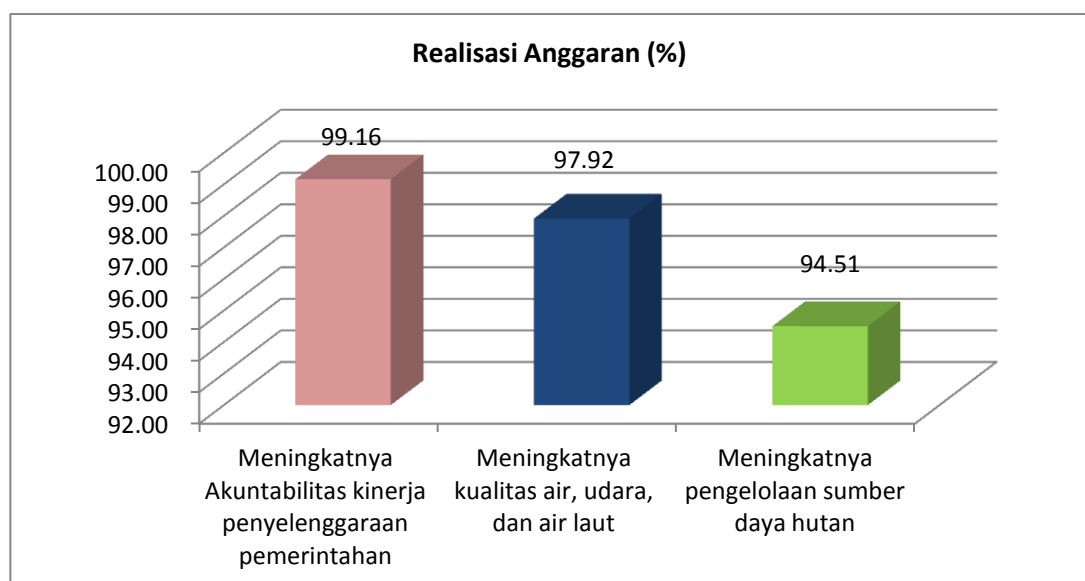
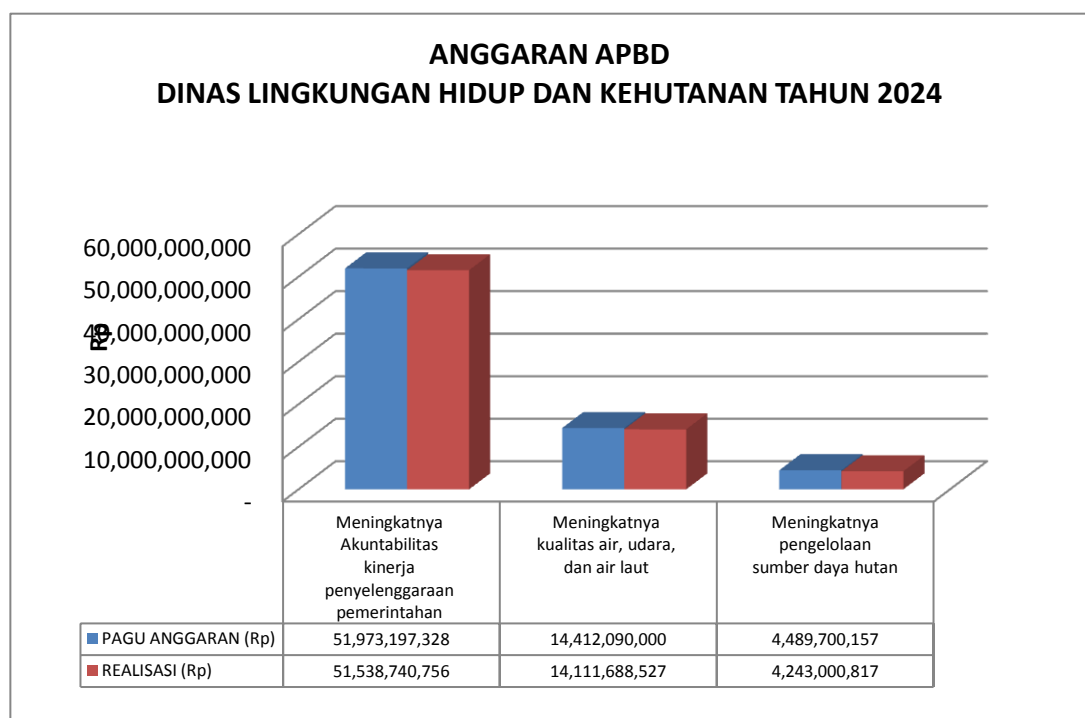
	16	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)		Ketercapaian ketersediaan jumlah bibit tanaman kehutanan dan tanaman produktif yang bersertifikat pada UPTD SPTH	100	104	104
		39	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	180	187	104
	17	Perbenihan Tanaman Hutan		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan	100	100	100
		40	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1	1	100
		41	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1	1	100
		42	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	1	1	100
		43	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	4	4	100
		44	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	1	1	100
UPTD PENGELOLAAN TAHURA BANTEN							
2D	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	100	100	100

	18	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100	100	100
		45	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	48	48	100
		46	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	50	50	100
		47	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	12.5	12.5	100
		48	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	3	3	100
		49	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	1	1	100
		50	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	4	4	100
		51	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari Tahura Berdasarkan Hasil Penataan Kawasan Tahura Provinsi	1	1	100
		52	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2	2	100

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja pada APBD Perubahan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 70.874.987.485,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 69.893.430.100,00 atau sebesar 98,62%. Sedangkan untuk pendapatan realisasinya sebesar Rp. 199.412.500,00 dari target sebesar Rp. 276.120.000,00 (72,22%).

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 adalah sebagaimana grafik berikut:



Adapun Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada setiap sasaran sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan/sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
SEKRETARIAT				45,656,595,468	45,332,279,910	99.2897
1 A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			45,656,595,468	45,332,279,910	99.2897
	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		401,008,000	395,534,631	98.64
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80,000,000	79,120,891	98.90
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,000,000	8,926,400	99.18
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9,000,000	7,827,100	86.97
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5,000,000	4,900,000	98.00
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5,000,000	4,900,000	98.00
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	99,091,990	99.09

		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193,008,000	190,768,250	98.84
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35,539,122,000	35,287,429,114	99.29
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34,828,767,000	34,620,401,729	99.40
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	601,355,000	559,791,000	93.09
		10	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	51,000,000	49,870,785	97.79
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6,500,000	6,475,000	99.62
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,500,000	6,360,000	97.85
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	32,000,000	31,717,000	99.12

		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	6,500,000	6,330,000	97.38
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6,500,000	6,483,600	99.75
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20,000,000	19,999,000	99.995
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20,000,000	19,999,000	99.995
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		92,500,000	89,366,300	96.61
		17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000	37,626,300	94.07
		18	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,000,000	3,870,000	96.75
		19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,500,000	47,870,000	98.70
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		521,806,468	521,016,349	99.85
		20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42,865,000	42,860,700	99.99

		21	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144,880,000	144,829,500	99.97
		22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137,483,000	137,317,620	99.88
		23	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	19,842,618	99.21
		24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	11,984,000	99.87
		25	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149,578,468	149,562,911	99.99
		26	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15,000,000	14,619,000	97.46
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8,433,477,000	8,374,389,316	99.30
		27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,741,549,883	1,720,664,936	98.80
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6,691,927,117	6,653,724,380	99.43
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		648,682,000	644,545,200	99.36
		29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	300,000,000	299,237,000	99.75

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240,702,000	238,384,400	99.04
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,980,000	47,746,800	99.51
		32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	29,187,000	97.29
		33	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000	29,990,000	99.97
CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG				490,404,400	474,621,659	96.78
1B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			490,404,400	474,621,659	96.78
	8	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		62,667,400	56,983,299	90.93

		34	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,300,000	2,873,000	87.06
		35	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,500,000	14,897,500	90.29
		36	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,300,000	2,516,000	76.24
		37	Penyediaan Bahan Logistik	2,200,000	1,718,000	78.09
		38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000	9,249,825	84.09
		39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1,367,400	1,367,400	100.00
		40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25,000,000	24,361,574	97.45
	9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)		301,917,000	295,906,760	98.01
		41	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	61,740,000	57,896,760	93.78
		42	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	240,177,000	238,010,000	99.10
	10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		125,820,000	121,731,600	96.75

		Pemerintah Daerah (CDLHK Lebak Tangerang)				
		43	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92,700,000	92,289,600	99.56
		44	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,120,000	29,442,000	88.89
CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON				379,617,000	370,898,410	97.70
1 C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			379,617,000	370,898,410	97.70
	11	Administrasi Umum Perangkat Daerah (CDLHK Pandeglang Serang Cilegon)		110,000,000	108,652,400	98.77
		45	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	29,835,400	99.45
		46	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	24,735,500	98.94
		47	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15,000,000	14,335,500	95.57
		48	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	10,000,000	9,991,000	99.91

			undangan			
		49	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,000,000	29,755,000	99.18
	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)		178,617,000	171,492,010	96.01
		50	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListriK	33,500,000	27,132,010	80.99
		51	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	145,117,000	144,360,000	99.48
	13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (CDLHK PSC)		91,000,000	90,754,000	99.73
		52	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,000,000	65,937,000	99.90
		53	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000	24,817,000	99.27
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				524,000,000	520,762,850	99.38
1 D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			524,000,000	520,762,850	99.38
	14	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)		234,000,000	231,608,800	98.98
		54	Penyediaan Komponen Instalasi	7,500,000	7,431,300	99.08

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		55	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,000,000	34,406,800	98.31
		56	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000	148,525,200	99.02
		57	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,500,000	6,265,500	96.39
		58	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35,000,000	34,980,000	99.94
	15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Laboratorium Lingkungan)		290,000,000	289,154,050	99.71
		59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185,000,000	184,594,050	99.78
		60	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105,000,000	104,560,000	99.58
UPTD SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN				513,502,000	484,036,194	94.26
1 E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			513,502,000	484,036,194	94.26
	16	Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD SPTH)		107,400,000	105,986,266	98.68

		61	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	5,866,000	97.77
		62	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,000,000	18,663,364	98.23
		63	Penyediaan bahan Logistik Kantor	43,000,000	42,423,765	98.66
		64	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,000,000	5,901,937	98.37
		65	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,400,000	5,171,200	95.76
		66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,000,000	27,960,000	99.86
	17	Pengadaan barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)		30,000,000	29,190,985	97.30
		67	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	29,190,985	97.30
	18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPTD SPTH)		143,520,000	120,234,943	83.78
		68	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	58,520,000	47,736,943	81.57
		69	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,000,000	72,498,000	85.29
	19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD SPTH)		232,582,000	228,624,000	98.30
		70	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	63,333,500	63136800	99.69

			Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan,			
		71	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	26,758,200	89.19
		72	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139,248,500	138,729,000	99.63
UPTD PENGELOLAAN TAHURA BANTEN				4,409,078,460	4,356,141,733	98.80
1 F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			4,409,078,460	4,356,141,733	98.80
	20	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		295,243,700	292,785,040	99.17
		73	Peyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	90,620,000	89,623,000	98.90
		74	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,829,000	33,431,000	98.82
		75	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87,479,700	86,923,040	99.36
		76	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,124,000	19,120,000	99.98
		77	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2,064,000	2,064,000	100.00
		78	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,127,000	61,624,000	99.19
	21	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH (UPTD Pengelolaan Tahura		1,108,052,460	1,094,920,572	98.81

		Banten)				
		79	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123,566,000	121,620,100	98.43
		80	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	984,486,460	973,300,472	98.86
	22	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		63,776,300	59,174,780	92.78
		81	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	63,776,300	59,174,780	92.78
	23	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (UPTD Pengelolaan Tahura Banten)		2,942,006,000	2,909,261,341	98.89
		82	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,836,000	95,027,200	99.16
		83	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	2,846,170,000	2,814,234,141	98.88
JUMLAH TOTAL				51,973,197,328	51,538,740,756	99.16

- 2) Realisasi anggaran pada Sasaran Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut dengan indikator tujuan/sasaran Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				2,249,055,000	2,192,548,976	97.49
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			796,437,600	766,434,074	96.23
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		396,009,000	392,715,100	99.17
		1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	309,679,000	306,663,100	99.03
		2	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	86,330,000	86,052,000	99.68
	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		400,428,600	373,718,974	93.33
		3	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	24,185,000	23,355,000	96.57
		4	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	376,243,600	350,363,974	93.12
2	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			133,400,000	124,560,000	93.37
	3	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		8,400,000	7,800,000	92.86

		5	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	8,400,000	7,800,000	92.86
	4	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		125,000,000	116,760,000	93.41
		6	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	125,000,000	116,760,000	93.41
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			855,615,000	845,843,690	98.86
	5	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		855,615,000	845,843,690	98.86
		7	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	19,960,000	19,960,000	100.00
		8	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	50,000,000	48,607,600	97.22
		9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	451,330,000	444,885,045	98.57

		10	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	334,325,000	332,391,045	99.42
4	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			150,000,000	145,159,000	96.77
	6	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		150,000,000	145,159,000	96.77
		11	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150,000,000	145,159,000	96.77
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			127,092,400	125,973,212	99.12
	7	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		127,092,400	125,973,212	99.12
		12	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1,458,400	1,420,000	97.37
		13	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	125,634,000	124,553,212	99.14

6	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		186,510,000	184,579,000	98.96
8	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		186,510,000	184,579,000	98.96
14		Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	39,000,000	38470000	98.64
15		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	43,450,000	43306500	99.67
16		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	104,060,000	102802500	98.79
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN			11,918,015,000	11,679,738,474	98.00
7 A	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		2,281,010,000	2,231,864,400	97.85
9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		2,281,010,000	2,231,864,400	97.85
17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20,100,000	20,062,400	99.81
18		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10,000,000	9,646,100	96.46

		19	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	10,000,000	9,882,500	98.83
		20	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	1,942,950,000	1,898,161,400	97.69
		21	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	10,000,000	9,753,500	97.54
		22	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	15,640,000	15,638,500	99.99
		23	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	241,880,000	238,695,000	98.68
		24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	20,440,000	20,379,000	99.70
		25	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	10,000,000	9,646,000	96.46
		26	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (tidak dilaksanakan dalam APBD Perubahan)	-		#DIV/0!
8		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI		6,000,000	5,980,000	99.67
	10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		6,000,000	5,980,000	99.67
		27	Pengembangan Kapasitas	6,000,000	5,980,000	99.67

			Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
9			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50,000,000	49,163,820	98.33
	11		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50,000,000	49,163,820	98.33
		28	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25,000,000	24,823,900	99.30
		29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	25,000,000	24,339,920	97.36
10			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	9,581,005,000	9,392,730,254	98.03
	12		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	9,581,005,000	9,392,730,254	98.03
		30	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	9,556,120,000	9,370,038,342	98.05
		31	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	24,885,000	22,691,912	91.19
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				245,020,000	239,401,077	97.71

7 B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			245,020,000	239,401,077	97.71
	13	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		150,000,000	149,434,600	99.62
		32	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	75,000,000	74,930,100	99.91
		33	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	25,000,000	24,714,000	98.86
		34	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi (tidak dilaksanakan dalam APBD Perubahan)	0	-	#DIV/0!
		35	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	50,000,000	49,790,500	99.58
	14	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		95,020,000	89,966,477	94.68
		36	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	95,020,000	89,966,477	94.68
JUMLAH TOTAL				14,412,090,000	14,111,688,527	97.92

- 3) Realisasi anggaran pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN			692,234,000	644,957,955	93.17
1A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		692,234,000	644,957,955	93.17
	1	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	184,024,000	169,949,261	92.35
		1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	184,024,000	169,949,261	92.35
	2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	107,250,000	97,209,824	90.64
		2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	17,250,000	14,724,000	85.36
		3 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	30,000,000	27,304,824	91.02
		4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	30,000,000	27,070,500	90.24
		5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	30,000,000	28,110,500	93.70
	3	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	270,000,000	250,807,370	92.89
		6 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75,000,000	70,772,070	94.36
		7 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	195,000,000	180,035,300	92.33
	4	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	130,960,000	126,991,500	96.97
		8 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun	55,960,000	54,131,500	96.73
		9 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	75,000,000	72,860,000	97.15

BIDANG PENGELOLAN DAS, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				1,060,879,000	1,030,165,850	97.10
2 A	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			305,918,000	289,390,000	94.60
	5	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		305,918,000	289,390,000	94.60
		10	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	26,680,000	23210500	87.00
		11	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	40,000,000	35893500	89.73
		12	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	239,238,000	230286000	96.26
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			372,336,000	367,658,050	98.74
	6	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		372,336,000	367,658,050	98.74
		13	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	30,530,000	29170100	95.55
		14	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	279,536,000	277101650	99.13
		15	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	62,270,000	61386300	98.58
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			382,625,000	373,117,800	97.52
	7	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi		382,625,000	373,117,800	97.52
		16	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	33,566,000	33350000	99.36
		17	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	319,059,000	310202900	97.22
		18	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	30,000,000	29564900	98.55
CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG				690,826,000	594,545,830	86.06
1 B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			605,850,000	512,018,210	84.51
	8	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas		25,000,000	24,508,000	98.03

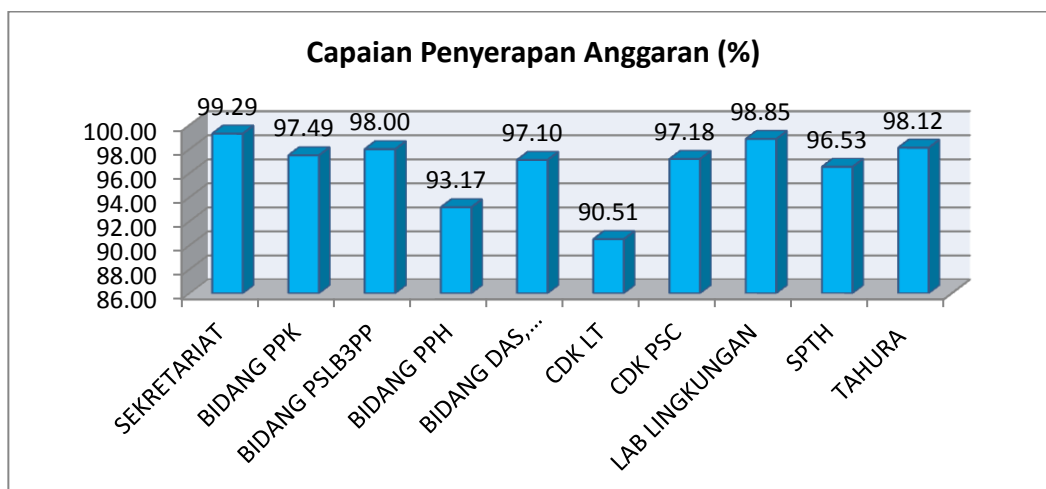
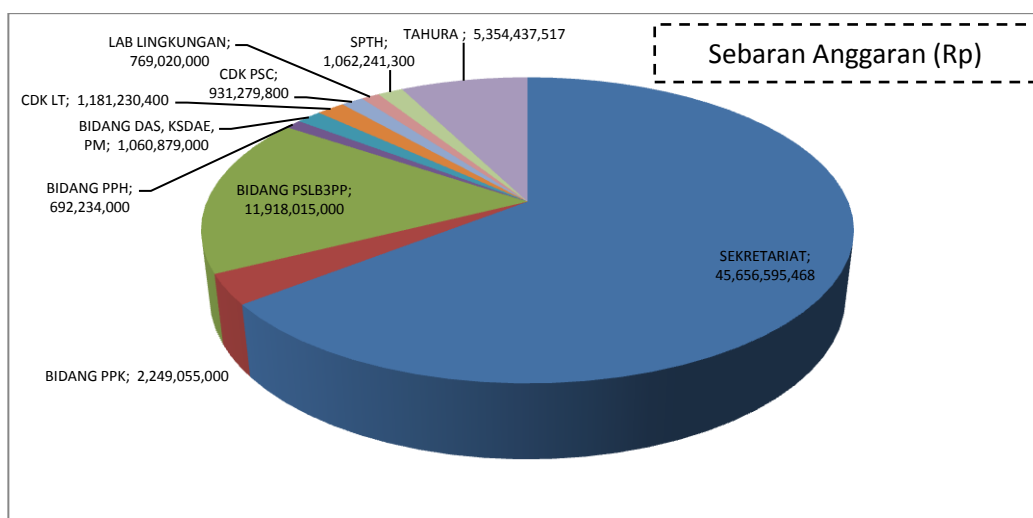
		Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK LT)			
	19	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25,000,000	24,508,000	98.03
	9	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-LT)	580,850,000	487,510,210	83.93
	20	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	38,560,000	37,808,300	98.05
	21	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	450,000,000	423,308,100	94.07
	22	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	6,040,000	5,562,200	92.09
	23	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30,000,000	19,331,610	64.44
	24	Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	56,250,000	1,500,000	2.67
2B		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	84,976,000	82,527,620	97.12
	10	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	20,000,000	19,756,680	98.78
	25	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK LT)	20,000,000	19,756,680	98.78
	11	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	64,976,000	62,770,940	96.61
	26	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK LT)	15,000,000	14,715,000	98.10
	27	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK LT)	5,800,000	5,223,000	90.05
	28	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK LT)	44,176,000	42,832,940	96.96

CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG, SERANG, CILEGON			551,662,800	534,152,415	96.83
1 C	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		462,992,800	455,325,915	98.34
	12	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 /Tahun (CDLHK PSC)	25,000,000	24,796,000	99.18
		29 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	25,000,000	24,796,000	99.18
	13	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (CDLHK-PSC)	437,992,800	430,529,915	98.30
		30 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	20,473,800	19,526,200	95.37
		31 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	281,269,000	280,049,615	99.57
		32 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	50,000,000	46,990,500	93.98
		33 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	30,000,000	29,492,600	98.31
		34 Rehabilitasi Mangrove di Luar kawasan Hutan	56,250,000	54,471,000	96.84
2C	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		88,670,000	78,826,500	88.90
	14	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Append) CITES (Convension On nternational Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	20,000,000	19,335,500	96.68
		35 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (CDLHK PSC)	20,000,000	19,335,500	96.68
	15	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK PSC)	68,670,000	59,491,000	86.63
		36 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst (CDLHK PSC)	5,370,000	4,796,000	89.31
		37 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (CDLHK PSC)	13,300,000	12,460,000	93.68
		38 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (CDLHK PSC)	50,000,000	42,235,000	84.47

UPTD SERTIFIKASI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN				548,739,300	541,385,512	98.66
1 D	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			548,739,300	541,385,512	98.66
	16	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (UPTD SPTH)		439,755,300	433,173,906	98.50
		39	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	439,755,300	433,173,906	98.50
	17	Perbenihan Tanaman Hutan		108,984,000	108,211,606	99.29
		40	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	25,000,000	24,667,806	98.67
		41	Sertifikasi Sumber Benih	25,000,000	24,728,200	98.91
		42	Sertifikasi Mutu Benih	25,000,000	24,912,600	99.65
		43	Sertifikasi Mutu Bibit	25,000,000	24,936,200	99.74
		44	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	8,984,000	8,966,800	99.81
UPTD PENGELOLAAN TAHURA BANTEN				945,359,057	897,793,255	94.97
2D	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			945,359,057	897,793,255	94.97
	18	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		945,359,057	897,793,255	94.97
		45	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	404,597,057	403157000	99.64
		46	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	50,000,000	47704307	95.41
		47	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	50,000,000	46465500.0	92.93
		48	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	19,880,000	17937000	90.23
		49	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	20,000,000	19854500	99.27
		50	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	125,000,000	109199000	87.36
		51	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	162,948,000	142420410	87.40
		52	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	112,934,000	111055538	98.34
JUMLAH TOTAL				4,489,700,157	4,243,000,817	94.51

Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan Bidang/CDK/UPT Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten APBD Tahun 2024 adalah sebagaimana table dan grafik berikut:

Bidang/CDK/UPT	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
SEKRETARIAT	45,656,595,468	45,332,279,910	99.29
BIDANG PPK	2,249,055,000	2,192,548,976	97.49
BIDANG PSLB3PP	11,918,015,000	11,679,738,474	98.00
BIDANG PPH	692,234,000	644,957,955	93.17
BIDANG DAS, KSDAE, PM	1,060,879,000	1,030,165,850	97.10
CDK LT	1,181,230,400	1,069,167,489	90.51
CDK PSC	931,279,800	905,050,825	97.18
LAB LINGKUNGAN	769,020,000	760,163,927	98.85
SPTH	1,062,241,300	1,025,421,706	96.53
TAHURA	5,354,437,517	5,253,934,988	98.12
JUMLAH	70,874,987,485	69,893,430,100	98.62



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun 2024 yaitu:

1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten yang ditetapkan adalah:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator tujuan/sasaran Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Kategori/Nilai);
 - b. Meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut dengan indikator tujuan/sasaran Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
 - c. Meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL).
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja, 15 (lima belas) Program dengan 22 Indikator Program 55 Kegiatan serta 171 Sub Kegiatan (menjadi 169 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 70.874.987.485,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 69.893.430.100,- atau sebesar 98.62%.
3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yaitu 1 Program, 23 Kegiatan, 83 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat pada Unit Induk, serta Sub Bagian Tata Usaha pada setiap Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 51.973.197.328,- dan terealisasi sebesar Rp.51.538.740.756,- atau sebesar 99.16%.
4. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya kualitas air, udara, dan air laut pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan melaksanakan 10 Program, 14 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan (berubah menjadi 34 Sub Kegiatan dalam APBD Perubahan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.412.090.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.111.688.527,- atau sebesar 97.92%.
5. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2024 sebesar 69.84, capaian sebesar 94,10% dari target yang ditetapkan.

6. Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 sebesar 54.32, capaian IKA sebesar 99.74% dari target yang ditetapkan.
7. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) pada tahun 2024 sebesar 85.46, capaian IKAL sebesar 103,03% dari target yang ditetapkan.
8. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung sasaran meningkatnya pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator tujuan/sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan dengan melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan, 52 Sub Kegiatan, jumlah anggaran sebesar Rp.4.489.700.157,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.243.000.817,- atau sebesar 94.51%.
9. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL/IKL) pada tahun 2024 sebesar 43.03, capaian IKTL sebesar 110.16% dari target yang ditetapkan.
10. Nilai dan Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Banten pada Tahun 2024 berdasarkan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 62,54% (Sedang).

4.2 Saran-Saran Rekomendasi

Guna memperbaiki capaian kinerja tahun berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten akan melakukan beberapa alternative/solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran pada tahun selanjutnya yaitu dengan melakukan:

- a) Peningkatan Pengelolaan Emisi dari Kendaraan
- b) Pengendalian Emisi Industri
- c) Penanganan Sampah
- d) Penghijauan dan Pengurangan Polusi
- e) Mengkampanyekan gerakan tanam pohon di masyarakat
- f) Penggunaan Teknologi dan Pemantauan Kualitas Udara
- g) Edukasi dan Kesadaran Publik
- h) Kerjasama Lintas Sektor
- i) Peningkatan Pengelolaan Limbah Domestik
- j) Penegakan Hukum
- k) Pengelolaan Sedimentasi
- l) Peningkatan Praktik Pertanian Ramah Lingkungan
- m) Pengendalian Limbah Laut: Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan limbah domestik dan industri ke perairan laut
- n) Pelaksanaan program bersih pantai secara berkala melibatkan masyarakat dan komunitas lokal.
- o) Meningkatkan luas areal penanaman pada lahan kritis
- p) Meningkatkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan Pusat

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,



AL MUKTABAR

Pihak Pertama,



WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Air Laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,22
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	54,46
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Nilai	80,20
3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,20
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276.120.000
4.1.02	Retribusi Daerah	276.120.000
	JUMLAH PENDAPATAN	276.120.000

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.626.242.726
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.493.357.726
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	577.907.600
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.569.950.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.092.400
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000

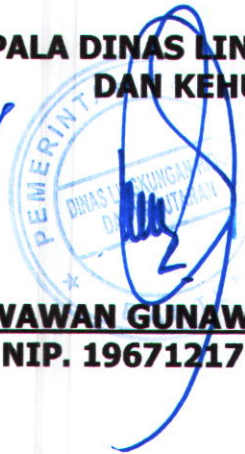
KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	990.000.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.312.935.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.292.500.000
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.327.500.000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.395.000.000
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	310.000.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000
	JUMLAH BELANJA	66.918.742.726

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**



WAWAN GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Adapun lampiran pada Perjanjian Kinerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Serang,

2024

Pihak Kedua,



AL MUKTABAR

Pihak Pertama,



Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006

SATUAN KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DPPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,15	70-80	70-80	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
2	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, dan Air Laut	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Kualitas udara Provinsi dihitung dengan capaian rata-rata kualitas udara pada 8 kab/kota	Nilai	66,67	74,22	74,22	Target tidak berubah sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Kualitas air provinsi diukur dengan menghitung capaian rata-rata Indeks kualitas air dari 8 kab/kota	Nilai	58,93	54,46	58,93	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci: Padatan Tersuspensi Total	Nilai	82,95	80,20	82,95	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODE/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	REALISASI (Triwulan III)	TARGET		KET
						MURNI	PERUBAHAN	
			(TSS), Oksigen Terlarut (DO), Minyak dan Lemak, Amonia Total (N-NH3) dan Orto-fosfat (PO4-P)					
3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKTL Provinsi didapat dengan menghitung Capaian rata-rata IKTL 8 kab/kota	Indeks	39,06	35,20	39,06	Target berubah sesuai dengan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276.120.000	276.120.000	0
4.1.02	Retribusi Daerah	276.120.000	276.120.000	0
	JUMLAH	276.120.000	276.120.000	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	62.626.242.726	66.385.287.328	3.759.044.602
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51.493.357.726	51.973.197.328	479.839.602
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	577.907.600	796.437.600	218.530.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.569.950.000	2.526.030.000	(43.920.000)
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	50.000.000	6.000.000	(44.000.000)
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	50.000.000	0

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	142.092.400	127.092.400	(15.000.000)
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	65.000.000	133.400.000	68.400.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	990.000.000	855.615.000	(134.385.000)
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	150.000.000	0
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	225.000.000	186.510.000	(38.490.000)
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.312.935.000	9.581.005.000	3.268.070.000
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	4.292.500.000	4.489.700.157	197.200.157

KODE	URUSAN/ PROGRAM	ANGGARAN		
		MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	2.327.500.000	2.309.816.100	(17.683.900)
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.395.000.000	1.424.923.057	29.923.057
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	310.000.000	372.336.000	62.336.000
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	260.000.000	382.625.000	122.625.000
	JUMLAH	66.918.742.726	70.874.987.485	3.956.244.759

Pj. GUBERNUR BANTEN,



AL MUKTABAR

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**



Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M.Si
NIP. 19671217 198803 1 006



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

INSPEKTORAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang Banten Telepon (0254) 7039946, Faksimile (0254) 267041
Laman www.inspektorat.bantenprov.go.id, Pos-el inspektorat@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Serang, 28 Februari 2025

Plt. Inspektur Daerah,

Dr. Dra. Hj. Sitti Ma'ani Nina, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19681012 198803 2 003